**PENGEMBANGAN MODEL ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMERINTAH KOTA MALANG
(Studi Kasus Kegiatan Bimbingan Teknis)**

Susenohaji

Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya
Jl. Veteran No. 12-13 Kota Malang
Telp. 081233000619, susenohaji@ub.ac.id; susenohaji@gmail.com

Diterima: 11 Januari 2018

Layak Terbit: 25 Januari 2018

***Abstract:** Development of Spending Standard Analysis Model in City Government of Malang (A Case Study of “Bimbingan Teknis” Activity). The aim of this study was to analyze the Standard of Spending Model Development in Malang City. The standard is determining the fairness and accountability of budget allocation model to each local government unit. This study developed previous model of Spending Standard Analysis for the program of the so-called BIMTEK or “Bimbingan Teknis”(a kind of technical guidance activity to help practitioners in dealing with Spending Standard Analysis) from the single model to multiple model. Single model was affected to the unfairness of budget allocation. Data sample were take from 2010 until 2016 which consists of 210 panel data from the Budget Allocation Document (DPA) from 15 local governmental units. The writer identified and divided 4 models based on BIMTEK activity characteristics and expenses account. There are two characteristics activity variables as the model determination, such as activity place (impact to rent expense) and official duties. These activity characteristics have impact on the amount of budget allocation for each BIMTEK. Then, the writer identified and determined the fixed and variable cost for each model. Cost Driver was built to allocation of variable expenses. The data were analyzed by using Simple Linear Regression to determine amount of fixed cost and variabel cost for each model. Finally, four models of Standard Spending Analysis in Malang City have been created and are expected to be able to create the fairness and accountability of budget allocation.*

***Keywords:** spending standard analysis, budget allocation document, budgetary allocation*

Abstrak: Pengembangan Model Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Malang (Studi Kasus Kegiatan Bimbingan Teknis). Tujuan penelitian adalah mengembangkan model Analisis Standar Belanja (ASB) di Kota Malang. ASB akan menentukan pagu alokasi anggaran yang adil dan akuntabel pada setiap perangkat daerah. Kajian ini mengembangkan model sebelumnya tentang ASB yang fokus pada kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK), dari model tunggal (satu model) menjadi model ganda (lebih dari satu model). Model tunggal telah berdampak pada ketidakadilan alokasi pagu anggaran ke setiap perangkat daerah. Data sample diambil dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) selama 7 tahun (2010-2016) dan 210 data panel BIMTEK dari 15 perangkat daerah. Kami

mengidentifikasi dan membagi BIMTEK menjadi 4 model ASB berdasarkan variabel karakteristik kegiatannya dan jenis biaya BIMTEK. Karakteristik kegiatan tersebut ditentukan oleh 2 variabel, yaitu tempat kegiatan (berdampak pada biaya sewa) dan perjalanan dinas. Karakteristik kegiatan berdampak pada alokasi anggaran setiap BIMTEK. Kemudian, penulis mengidentifikasi dan menentukan biaya tetap dan variabel setiap model. Pengendali biaya (*cost driver*) ditetapkan untuk menentukan biaya variabel. Data dianalisis dengan regresi linear sederhana untuk menentukan jumlah biaya tetap dan variabel untuk setiap model. Akhirnya, terdapat 4 model ASB BIMTEK Kota Malang. Hasil model diharapkan mampu membangun keadilan dan akuntabilitas alokasi anggaran.

Kata Kunci: Analisis Standar Belanja (ASB), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), alokasi anggaran

Akuntabilitas publik merupakan salah satu pilar penting dalam *Good Governance* dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif dan efisien. Salah satu strategi pencapaian *Good Governance* adalah standarisasi belanja melalui Sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Salah satu instrumen alokasi sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja adalah Analisis Standar Belanja (ASB). ASB adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan luaran (*output*) yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup dua hal, yaitu kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD).

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah instrumen/metode sangat penting dalam akuntabilitas perencanaan anggaran. Peraturan perundang-undangan telah mewajibkan (*mandatory*) kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan ASB dalam perencanaan anggaran. ASB mampu mendorong pemerintah daerah menyusun alokasi anggaran yang lebih adil dan akuntabilitas, serta anggaran akan

berfokus pada pencapaian target kinerja (*output dan outcome*) yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. Penerapan ASB dalam pengelolaan keuangan akan mampu mengurangi ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar perangkat daerah (Mahmudi, 2011).

Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menerapkan ASB sudah dimulai sejak tahun 2000 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dengan nama/istilah Standar Analisa Belanja (SAB). SAB kemudian berganti menjadi Analisis Standar Belanja (ASB) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 167 ayat (3) undang-undang menegaskan bahwa penyusunan Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja (ASB), standar harga, tolok ukur kinerja; dan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan ASB terus diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 298 ayat (3) undang-undang ini menegaskan bahwa belanja daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Analisis Standar Belanja (ASB) juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa dalam pembahasan oleh tim anggaran dilakukan untuk dokumen perencanaan serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja (ASB), standar satuan harga dan standar pelayanan minimal (SPM). Terakhir,

petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah pasal 93 kembali ditegaskan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pada indikator kinerja, capaian dan target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Penerapan ASB tidak hanya didorong oleh kewajiban (*mandatory*), tetapi juga adanya dorongan akademik teoritis bahwa ASB akan mengurangi adanya dampak inefisiensi keuangan negara. Pemerintah daerah yang tidak menerapkan ASB berpotensi mengalami berbagai masalah antara lain: 1) Plafon anggaran kegiatan pada PPAS ditetapkan menggunakan “intuisi” dan kepentingan subyektif ketua tim anggaran; 2) Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan; 3) Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi yang berbeda; 4) Tidak memiliki argumen yang kuat apabila “dituduh” melakukan pemborosan/inefisiensi dan 5) Penyusunan anggaran menjadi molor. ASB secara teoritis akan mendorong adanya pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, transparan dan adil sesuai dengan beban dan target kinerja yang ditetapkan (PSEK UGM, 2009).

Regulasi kebijakan yang bersifat *mandatory* dan manfaat akademik teoritis tersebut, memaksa dan memberi kesadaran pemerintah daerah untuk menerapkan ASB. Meski demikian, belum ada regulasi berbentuk edaran menteri yang secara operasional teknis mengatur format dan metode penghitungan ASB. Akibatnya, setiap pemerintah daerah harus mengembangkan beragam metode dan format ASB. Kelemahan ini tentu tidak menghilangkan kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan ASB dalam pengelolaan keuangan daerah. ASB tetap menjadi

kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah untuk menerapkannya. Bahkan, jaminan kewajiban penerapan tersebut maka ASB harus ditetapkan minimal dengan surat keputusan kepala daerah.

Hasil evaluasi empiris terhadap beberapa hasil kajian pengembangan model ASB di Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember (2012), Kota Batu (2015) dan Kabupaten Madiun (2016), menunjukkan adanya sebuah kelemahan metode, dimana suatu kegiatan diasumsikan hanya memiliki satu karakteristik sehingga digunakan nilai *cost driver* tunggal. Kegiatan dengan komponen biaya sedikit akan memperoleh besaran alokasi biaya yang sama dengan kegiatan dengan komponen biaya yang banyak. Besaran alokasi anggaran yang sama dengan karakteristik kegiatan yang berbeda. Akibatnya, kegiatan yang memiliki komponen biaya sedikit akan mengalami surplus, dan sebaliknya bagi kegiatan yang memiliki komponen biaya banyak akan defisit. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dikembangkan model penghitungan ASB yang lebih adil dan akuntabel dengan karakteristik aktivitas setiap kegiatan.

METODE

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengembangan metode ASB sebagai dasar penentuan besaran alokasi belanja setiap perangkat daerah yang sesuai dengan karakteristik setiap kegiatan. Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Malang. Lokasi dipilih dengan pertimbangan 3 hal, *pertama*, Pemerintah Kota Malang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 5 tahun terakhir, sehingga data dan proses pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel. *Kedua*, Kota Malang ingin

mengevaluasi model Anggaran Standar Belanja (ASB), dan *ketiga*, kesiapan beberapa perangkat daerah terkait. Penelitian dilakukan selama 2 bulan efektif, yaitu Bulan Oktober sampai Desember Tahun 2017. Jenis data penelitian ada 2, yaitu data sekunder (arsip) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) seluruh PD untuk Tahun Anggaran 2010-2016 yang ada di BPKAD dan data primer berupa notulen dan memo hasil *focus group discussion* (FGD).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu *pertama*, metode statistik deskriptif (*mean* dan standar deviasi) untuk menentukan nilai rata-rata (tengah), nilai batas atas dan nilai batas bawah setiap jenis biaya. *Kedua*, metode statistik induktif dengan metode regresi linear sederhana (*simple regression analysis*). Regresi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu menentukan proyeksi nilai besaran total belanja kegiatan tahun berikutnya dan menentukan proporsi jumlah biaya tetap kegiatan dan biaya variabel untuk setiap model. Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bx_1 \dots + e$$

- Y = Jumlah Total Biaya tahun ke-n
- a = Konstanta (Jumlah Biaya Tetap) tahun ke-n
- b₁ = Koefisien regresi jenis biaya
- x₁ = *Cost Driver* jenis biaya (x₁) - orang
- e = error.

Analisis data pembentukan model ASB dilakukan dengan 5 tahapan sistematis dan saling terkait, yaitu: tahap pengelompokan jenis kegiatan, tahap standarisasi (penyeragaman) jenis biaya, tahap perhitungan prakiraan (proyeksi) maju belanja kegiatan, dan tahap pembentukan model.

Pada tahap pembentukan model terdiri dari beberapa proses antara lain: memetakan, menggolongkan dan menstandarisasi kelompok kegiatan yang

sepadan. Menentukan klasifikasi biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan, menentukan pengendali belanja (*cost driver*) dari tiap-tiap jenis biaya dalam setiap kegiatan, menghitung proyeksi total belanja tahun berikutnya selama 5 tahun, melakukan analisis uji regresi data setiap kegiatan yang sudah dipetakan biaya tetap dan *cost driver* biaya variabel sebelumnya, melakukan analisis statistik deskriptif untuk memperoleh nilai mean dan standar deviasi, menghitung nilai rata-rata (mean, batas Atas, dan batas bawah untuk masing-masing jenis biaya) dengan menggunakan hasil olah data statistik deskriptif. Penentuan nilai rata, batas atas dan batas bawah adalah sebagai berikut (PSEKP UGM, 2009):

Nilai rata-rata : total nilai/jumlah data

Nilai Batas Bawah : (nilai rata-rata – standar deviasi)/total nilai
rata-rata

Nilai Batas Atas : (nilai rata-rata + standar deviasi)/total nilai
rata-rata

langkah selanjutnya adalah menyusun model analisis standar belanja (ASB) untuk setiap jenis kegiatan dan melakukan validasi model analisis standar belanja (ASB) melalui serangkaian simulasi dan uji coba (*trial error*) perhitungan pagu alokasi belanja kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASB sudah diterapkan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. ASB diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun sebelum proses penganggaran dilakukan, atau sebelum tersusunnya Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) APBD setiap awal tahun anggaran. KU-PPAS disusun berdasarkan pagu anggaran setiap perangkat daerah yang metode perhitungannya ditetapkan berdasarkan ASB. Pemerintah daerah menerapkan ASB sebagai sebuah kewajiban (*mandatory*) dan metode yang dipilih dan digunakan adalah sukarela (*voluntary*) karena setiap daerah dapat mengembangkan model sendiri. Peraturan menteri sebagai petunjuk teknis penentuan metode dan format perhitungan ASB belum diundangkan.

Kebijakan bersifat wajib dan sukarela tersebut mendorong pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur khususnya, mengembangkan model sendiri-sendiri sesuai kebutuhan dan karakteristik. Hasil evaluasi empiris terhadap berbagai model ASB yang diterapkan pemerintah daerah di Jawa Timur, antara lain Kabupaten Lamongan (2016), menunjukkan adanya beberapa kekurangan dalam pengembangan dan penerapan metode ASB. Kekurangan yang mendasar adalah asumsi bahwa kegiatan hanya memiliki satu karakteristik sehingga digunakan nilai *cost driver* tunggal. Kegiatan dengan komponen biaya sedikit akan memperoleh besaran alokasi biaya yang sama dengan kegiatan dengan komponen biaya yang banyak. Besaran alokasi anggaran yang sama dengan karakteristik kegiatan yang berbeda. Akibatnya, kegiatan yang memiliki komponen biaya sedikit akan mengalami surplus, dan sebaliknya bagi kegiatan yang memiliki komponen biaya banyak akan defisit.

Analisis empiris terhadap model ASB di pemerintah daerah adalah berupa kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK). Bimbingan teknis diasumsikan memiliki satu karakteristik, sehingga semua komponen biaya yang ada dimasukkan semua ke dalam satu model BIMTEK. Kegiatan BIMTEK diberbagai perangkat daerah

memiliki karakteristik yang sama, sehingga hanya dikembangkan satu model dan dengan variabel tunggal. Model kegiatan BIMTEK yang dikembangkan oleh PSEKP UGM (2009) memiliki beberapa komponen biaya seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Nama Komponen Biaya (Belanja) Kegiatan Bimbingan Teknis

Jenis Biaya (Belanja)	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0%	18,33%	41,51%
Honorarium non PNS	0%	9,71%	27,03%
Bahan material	0%	5,74%	27,93%
Bahan habis pakai	0%	9,87%	41,43%
Jasa kantor	0%	22,51%	70,77%
Cetak dan penggandaan	0%	12,13%	64,27%
Sewa	0%	0,69%	2,54%
Makan dan minum	0%	12,32%	26,59%
Perjalanan dinas	0%	8,70%	22,68%

Sumber: PSEKP UGM tahun 2009

Kegiatan BIMTEK diasumsikan memiliki karakteristik aktivitas dan jenis komponen biaya yang sama. BIMTEK harus memiliki komponen biaya bahan habis pakai untuk praktek dan simulasi BIMTEK. BIMTEK juga selalu membutuhkan biaya perjalanan dinas bagi peserta kegiatan untuk melakukan aktivitas studi banding atau kunjungan kerja ke daerah lain. BIMTEK yang membutuhkan kedua komponen biaya tentu pagu alokasi anggaran akan adil dan akuntabel. BIMTEK yang tidak memerlukan praktek dan studi banding, dapat memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dari pengajuan. Sedangkan, BIMTEK dengan komponen biaya bahan habis pakai praktek yang besar (praktek bongkar mesin) akan mengalami defisit jika digunakan dasar alokasi biaya untuk praktek yang kecil (praktek memasak).

Metode ASB dengan model tunggal masih akan berpotensi menghasilkan pagu alokasi anggaran yang belum adil dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan model perhitungan ASB dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik aktivitas BIMTEK dan komponen biaya di dalam setiap kegiatan

BIMTEK. Sampel kegiatan yang adalah kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Penelitian mencoba mengembangkan lebih dari satu model ASB berdasarkan pada karakteristik aktivitas BIMTEK dan kesamaan komponen biaya aktivitas, sehingga akan mudah ditemukan biaya pengendalinya.

ASB kegiatan BIMTEK di perangkat daerah Pemerintah Kota Malang memiliki karakteristik beragam. Karakteristik kegiatan BIMTEK menjadi salah satu indikator penting kesuksesan kegiatan BIMTEK. Pembagian karakteristik BIMTEK didasarkan pada 2 hal. *Pertama*, perbedaan aktivitas dalam setiap kegiatan BIMTEK. Variabel pembeda ini ada 2, yaitu BIMTEK yang membutuhkan sewa gedung (sewa hotel) tempat kegiatan dan BIMTEK yang membutuhkan aktivitas perjalanan dinas (studi banding) bagi peserta. Berdasarkan pada 2 variabel ini akan disusun matrik/model 4 jenis ASB BIMTEK. *Kedua*, karakteristik unik lain adalah BIMTEK pada perangkat daerah tertentu membutuhkan tambahan biaya lain dan sulit ditelusur melalui *cost driver*. Biaya ini antara lain biaya bahan habis pakai (biaya bahan praktek), biaya hadiah, dll. Komponen biaya ini harus dikeluarkan dari model dan ditambahkan secara manual karena sudah diukur dengan standar atau *cost driver*.

Karakteristik tersebut harus diakomodasi ke dalam model, sehingga akan memberikan prediktor ASB yang adil dan akuntabel dalam menghitung pagu alokasi anggaran setiap perangkat daerah. Keunikan karakteristik BIMTEK menghasilkan 4 matriks/model ASB BIMTEK, yaitu: pertama, kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan dengan menyewa gedung (hotel) di luar gedung pemerintah dan ada perjalanan dinas pada hari berikutnya, kedua, kegiatan bimbingan teknis

yang dilakukan di dalam gedung pemerintah dan ada perjalanan dinas pada hari berikutnya, ketigakegiatan bimbingan teknis yang dilakukan dengan menyewa gedung (hotel) di luar gedung pemerintah, tetapi tidak ada perjalanan dinas pada hari berikutnya, keempat kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan di dalam gedung pemerintah dan tidak ada perjalanan dinas pada hari berikutnya.

Komponen masing-masing biaya dari keempat model juga berbeda. BIMTEK dengan karakteristik dan komponen biaya yang banyak, membutuhkan pagu alokasi anggaran yang berbeda. Komponen biaya 4 model ASB dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen Biaya Pada 4 Model Analisis Standart Belanja (ASB)

No	Jenis Biaya	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
1	Honorarium PNS	√	√	√	√
2	Honorarium Non PNS	√	√	√	√
3	Alat Tulis Kantor	√	√	√	√
4	Honorarium TA/Instruktur/Narsum	√	√	√	√
5	Dekorasi dan Dokumentasi	√	√	√	√
6	Sewa Gedung/Ruangan	√	-	√	-
7	Cetak/Penggandaan	√	√	√	√
8	Makan dan Minum	√	√	√	√
9	Perjalanan Dinas	√	√	-	-
10	Bahan habis pakai (praktek)				
11	hadiah				

Selain perbedaan karakteristik setiap kegiatan BIMTEK pada Tabel 2, juga terdapat 2 komponen biaya (biaya bahan habis pakai/praktek dan biaya hadiah) yang tidak dapat dialokasikan berdasarkan *cost driver* yang ditetapkan. Kedua jenis biaya tersebut tidak ditelusur dan diukur dengan satuan *cost driver*, sehingga harus dikeluarkan dari model statistik. Biaya ini akan diperlakukan secara manual dengan menambahkan nilai jumlah biaya ke dalam hasil

perhitungan ASB. Asumsi digunakan dalam perlakuan ini adalah besarnya biaya tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan beberapa revisi model yang dikembangkan oleh beberapa pemerintah daerah tersebut, maka dihasilkan 4 matriks/model ASB BIMTEK di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Model-1. BIMTEK dengan Sewa Gedung (Hotel) dan ada Perjalanan Dinas

Deskripsi:

Bimbingan Teknis dilakukan dengan menyewa gedung (hotel) di luar Pemerintah Kota Malang dan dilakukan perjalanan dinas (studi banding) ke daerah lain. Perincian Model-1 dapat dilihat pada Tabel 3.

Pengendali Belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*):

= Rp. 1.475.288 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*):

= Rp. 998.129 per jumlah peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total (*total cost*):

Pagu Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 1.475.288 + (998.129 x jumlah peserta x jumlah hari) + biaya

lain (hadiah, bahan praktek, dll) luar model.

Tabel 3. Alokasi Biaya Kegiatan BIMTEK Model-1

No	Jenis Biaya	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	0%	5,29%	15,20%
2	Honorarium Non PNS	0%	3,91%	9,69%
3	Alat Tulis Kantor	0,78%	3,76%	6,74%
4	Honorarium TA/Instruktur/Narsum	2,35%	17,43%	32,50%
5	Dekorasi dan Dokumentasi	0%	1,70%	3,54%
6	Sewa Gedung/Ruangan	11,79%	35,35%	58,91%
7	Cetak/Penggandaan	1,81%	4,22%	6,63%
8	Makan dan Minum	0%	8,64%	18,27%
9	Perjalanan Dinas	0%	19,71%	48,43%

Model-2: BIMTEK di Gedung Pemkot Malang dan ada Perjalanan Dinas**Deskripsi:**

Bimbingan Teknis dilakukan di dalam (menggunakan) gedung Pemerintah Kota Malang dan dilakukan perjalanan dinas (studi banding) ke daerah lain. Perincian Model-2 dapat dilihat pada Tabel 4.

Pengendali Belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*):

= Rp. 13.066.257 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*):

= Rp. 579.998 per jumlah peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total (*total cost*):

Pagu Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 13.066.257 + (579.998 x jumlah peserta x jumlah hari) + biaya

lain (hadiah, bahan praktek, dll) luar model

Tabel 4. Alokasi Biaya Kegiatan BIMTEK Model-2

No	Jenis Biaya	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	0%	6,04%	23,51%
2	Honorarium Non PNS	0%	5,82%	14,99%
3	Alat Tulis Kantor	1,21%	5,82%	10,43%
4	Honorarium TA/Instruktur/Narsum	3,63%	26,95%	50,27%
5	Dekorasi dan Dokumentasi	0%	2,63%	5,48%
6	Cetak/Penggandaan	2,79%	6,52%	10,25%
7	Makan dan Minum	0%	13,36%	28,25%
8	Perjalanan Dinas	0%	30,48%	74,90%

Model-3: BIMTEK dengan Sewa Gedung (Hotel) dan Tidak ada Perjalanan

Dinas

Deskripsi:

Bimbingan Teknis dilakukan dengan menyewa gedung (hotel) di luar Pemerintah Kota Malang dan tidak dilakukan perjalanan dinas (studi banding) ke daerah lain.

Perincian Model-3 dapat dilihat pada Tabel 5.

Pengendali Belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*):

= Rp. 11.426.937 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*):

= Rp. 691.618 per jumlah peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total (*total cost*):

Pagu Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 11.426.937 + (691.618 x jumlah peserta x jumlah hari) + biaya

lain (hadiah, bahan praktek, dll) luar model.

Tabel 5. Alokasi Biaya Kegiatan BIMTEK Model-3

No	Jenis Biaya	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	0%	6,59%	18,93%
2	Honorarium Non PNS	0%	4,86%	12,07%
3	Alat Tulis Kantor	0,98%	4,69%	8,40%
4	Honorarium TA/Instruktur/Narsum	2,92%	21,70%	100%
5	Dekorasi dan Dokumentasi	0%	2,12%	4,41%
6	Sewa Gedung/Ruangan	14,68%	44,02%	73,36%
7	Cetak/Penggandaan	2,25%	5,25%	8,25%
8	Makan dan Minum	0%	10,76%	22,75%

Model-4. BIMTEK di Gedung Pemkot Malangdan Tidak ada Perjalanan Dinas

Deskripsi:

Bimbingan Teknis dilaksanakan di dalam (menggunakan) gedung Pemerintah Kota Malangdan tidak dilakukan perjalanan dinas (studi banding) ke daerah lain. Perincian Model-4 dapat dilihat pada Tabel 5.

Pengendali Belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*):

= Rp. 24.881.143 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*):

= Rp. 245.790 per jumlah peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total (*total cost*):

Pagu Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 24.881.143 + (245.790 x jumlah peserta x jumlah hari) + biaya

lain (hadiah, bahan praktek, dll) luar model.

Tabel 6. Alokasi Biaya Kegiatan BIMTEK Model 4

No	Jenis Biaya	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	0%	11,78%	33,83%
2	Honorarium Non PNS	0%	8,69%	21,56%
3	Alat Tulis Kantor	1,74%	8,37%	15,00%
4	Honorarium TA/Instruktur/Narsum	5,23%	38,77%	72,32%
5	Dekorasi dan Dokumentasi	0%	3,78%	7,88%
6	Cetak/Penggunaan	4,02%	9,38%	14,74%
7	Makan dan Minum	0%	19,22%	40,64%

KESIMPULAN DAN SARAN

Metode ASB tidak dapat dikembangkan dengan asumsi karakteristik aktivitas tunggal, tetapi harus dicermati dan diklasifikasi karakteristik aktivitas setiap BIMTEK dan perilaku biaya setiap kegiatan. Metode ASB dikembangkan menjadi 4 model dengan variabel prediktor sewa gedung (sewa hotel) tempat kegiatan dan aktivitas perjalanan dinas (studi banding) bagi peserta. Berdasarkan pada 2 variabel ini akan disusun matrik/model 4 jenis ASB BIMTEK. Biaya lain yang sulit ditelusur melalui *cost driver*, antara lain biaya bahan habis pakai (biaya bahan praktek), biaya hadiah, dll, harus dikeluarkan dari model dan ditambahkan manual berdasarkan nilai tahun sebelumnya.

Setiap pemerintah daerah yang menentukan model ASB harus cermat dalam merencanakan mengklasifikasi variabel prediktor model, sehingga pagu alokasi anggaran kegiatan BIMTEK setiap perangkat daerah benar-benar akuntabel dan adil. Penerapan ASB ke perencanaan pagu anggaran harus dilakukan bertahap dan sistematis ke berbagai kelompok kegiatan. Model ASB juga harus diakomodasi dalam penerapan aplikasi *e-budgeting*, sehingga setiap

perangkat daerah memiliki standar jenis biaya dan satuan yang sama dalam setiap kelompok kegiatan dan pagu alokasi anggaran akan lebih adil dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Fatikhah, Dewi Noor. 2015. *Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Batu, Universitas Brawijaya*. (Online), ([http:// www.scholar.google.com](http://www.scholar.google.com)), diakses 24 Desember 2017.
- Lembaga Penelitian Universitas Jember. 2012. *Analisis Standar Belanja (ASB): Daerah Kabupaten Jember*. (Online), ([http:// www.scholar.google.com](http://www.scholar.google.com)), diakses 26 Desember 2017.
- Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga. 2016. *Laporan Akhir Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Madiun*. (Online), ([http:// www.scholar.google.com](http://www.scholar.google.com)), diakses 26 Desember 2017.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022. (Online), (<http://www.setneg.go.id>), diakses 21 Desember 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578. (Online), (<http://www.setneg.go.id>), diakses 21 Desember 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Tahun 2007, (Online), (<http://www.kemendagri.go.id>), diakses 23 Desember 2017.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2017, (Online), (<http://www.lamongankab.jdih.go.id>), diakses 23 Desember 2017.
- Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada,. 2009. *Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB): Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah*. (Online), ([http:// www.scholar.google.com](http://www.scholar.google.com)) diakses 21 Desember 2017.
- Tangkowit, Reince Herry, Lintje Kalangi, Linda Lambey. *Faktor-faktor Penghambat Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) pada Pemerintah Kota Mobangu. Program Magister Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. (Online), (<http://www.scholar.google.com>), diakses 26 Desember 2017.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.(Online), (<http://www.setneg.go.id>), diakses 21 Desember 2017.